

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Depok dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) tidak diwujudkan dalam satu program bersama yang bersifat khusus, melainkan melalui dukungan Dinas Kesehatan Kota Depok terhadap berbagai program yang diinisiasi oleh PPTI Depok. Kolaborasi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor politik dan sosial yang menunjukkan adanya kebutuhan serta dasar kelembagaan untuk melibatkan organisasi masyarakat dalam penanggulangan TBC. Secara hukum, keberadaan PPTI sebagai mitra Pemerintah Kota Depok ditegaskan melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2023, sedangkan secara sosial kolaborasi didorong oleh kebutuhan untuk memperluas jangkauan penanggulangan TBC kepada masyarakat melalui jaringan kader dan komunitas.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015) melalui kerangka *Collaboration Dynamics*, kolaborasi telah berjalan dan menghasilkan hubungan kemitraan yang relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Pada dimensi *Principled Engagement*, kedua aktor telah mampu membangun kesepahaman mengenai pentingnya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) meskipun terdapat perbedaan perspektif dalam mengidentifikasi isu prioritas. Kesepakatan mengenai tujuan kolaborasi disepakati melalui fokus pada pemberdayaan masyarakat dan edukasi promotif preventif seperti program *Laskar TB Goes To School*. Selain itu, proses musyawarah dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui kombinasi komunikasi informal dan forum formal, sehingga keputusan program dihasilkan secara bersama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Namun, pelaksanaan forum deliberasi formal masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan mekanisme musyawarah yang lebih terstruktur agar koordinasi, evaluasi, dan penyusunan strategi kolaborasi dapat berlangsung secara lebih efektif dan partisipatif.

Pada dimensi *Shared Motivation*, hubungan kolaboratif berdasarkan tingkat kepercayaan yang cukup kuat antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok. Kedua pihak memahami peran, fungsi, serta kontribusi masing-masing dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) sehingga mampu menciptakan hubungan kerja yang saling melengkapi. Selain itu, PPTI Depok memperoleh legitimasi yang kuat melalui pengakuan formal sebagai bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kota Depok. Akan tetapi, aspek komitmen kelembagaan masih memerlukan penguatan karena pembaruan PKS (Perjanjian Kerja Sama) belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan kolaborasi dalam jangka panjang apabila tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan yang lebih jelas.

Sementara itu, pada dimensi *Capacity for Joint Action*, kolaborasi menunjukkan kapasitas yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program. Mekanisme koordinasi dan pembagian peran telah terbentuk meskipun sebagian besar berlangsung melalui pengaturan informal komunikasi langsung. Kehadiran Staff Pengelola Program Pengendalian Tuberkulosis (TBC)/Wasor TB sebagai penghubung membuat komunikasi dan monitoring berjalan dengan lancar melalui koordinasi beliau. Dari sisi sumber daya, keterbatasan pendanaan akibat tidak adanya dana hibah kemitraan menjadi tantangan yang dihadapi PPTI Depok. Namun, ketiadaan dana ini tidak semata menrenggangkan hubungan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Selain itu, pertukaran informasi yang berlangsung secara dua arah antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok dan kader memungkinkan tersedianya informasi yang lebih banyak dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok telah berjalan cukup baik dan mampu mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) melalui sinergi peran, kepercayaan antaraktor, serta kapasitas bersama dalam pelaksanaan program. Beberapa aspek yang memiliki kekurangan berpotensi memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan kolaborasi apabila tidak diimbangi dengan penguatan aspek kelembagaan. Oleh karena itu, perbaikan aspek kolaborasi yang harus dilakukan yaitu pada kebutuhan untuk memperkuat mekanisme kolaborasi yang

lebih formal, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga hubungan kemitraan yang telah terbangun tidak hanya mampu mendukung pelaksanaan program saat ini, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Depok kedepannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Pertama, dalam *Principled Engagement*, Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok perlu meningkatkan kualitas proses keterlibatan bersama melalui forum koordinasi dan musyawarah formal yang dilaksanakan secara lebih rutin dan terjadwal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi selama ini lebih banyak berlangsung melalui mekanisme informal. Meskipun kondisi tersebut mampu mendukung pelaksanaan program, forum formal tetap diperlukan untuk memperkuat proses identifikasi permasalahan, penyelarasan prioritas, pertukaran gagasan, serta pengambilan keputusan bersama secara lebih partisipatif. Dengan demikian, proses kolaborasi tidak hanya berjalan berdasarkan kebutuhan operasional, tetapi juga didukung oleh ruang deliberasi yang memadai untuk membangun kesepahaman dan solusi bersama.

Kedua, dalam *Shared Motivation*, Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok perlu memperkuat aspek komitmen kelembagaan melalui pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen kerja sama lainnya secara berkala. Meskipun tingkat kepercayaan, pemahaman bersama, dan legitimasi antaraktor telah terbangun dengan baik, keberlanjutan kolaborasi akan lebih terjamin apabila didukung oleh komitmen formal yang jelas dan terdokumentasi. Penguatan aspek kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tetap berjalan secara konsisten meskipun terjadi perubahan kepemimpinan, pergantian personel, maupun perubahan kebijakan pada masing-masing organisasi.

Ketiga, dalam *Capacity for Joint Action*, diperlukan penguatan kapasitas kolaborasi melalui dukungan sumber daya yang lebih memadai, peningkatan kapasitas organisasi, serta optimalisasi mekanisme pertukaran informasi. Keterbatasan pendanaan yang dialami PPTI Depok menunjukkan bahwa aspek

sumber daya masih menjadi tantangan dalam mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas dukungan sumber daya serta memperkuat kapasitas kader dan organisasi agar mampu mempertahankan kualitas program yang telah berjalan. Selain itu, sistem pertukaran informasi yang selama ini berlangsung perlu terus dipertahankan dan dikembangkan agar setiap aktor memiliki akses terhadap informasi yang akurat dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

5.2.2 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan melibatkan aktor yang lebih beragam dan cakupan penelitian yang lebih luas. Penelitian ini berfokus pada dinamika kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok melalui tiga komponen *Collaboration Dynamics*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis dengan mengkaji dimensi lain dalam kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)*, seperti *Actions* dan *Impact*, untuk melihat bagaimana dinamika kolaborasi ke dalam tindakan bersama serta bagaimana kontribusinya terhadap dampak penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

Secara keseluruhan, penguatan pada komponen *Principled Engagement*, *Shared Motivation*, dan *Capacity for Joint Action* diperlukan agar kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Depok dan PPTI Depok tidak hanya mampu mempertahankan hubungan kerja sama yang telah terbangun, tetapi juga berkembang menjadi tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Dengan penguatan tersebut, kolaborasi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis (TBC) serta peningkatan kesehatan di Kota Depok.